

KERANGKA ACUAN KERJA
PENGUATAN PERAN SERTA DHARMA WANITA PERSATUAN (DWP)
PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

I. PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

Beberapa masalah yang dihadapi dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah 1) Belum optimalnya kualitas hidup dan peran perempuan; 2) Masih terjadinya kesenjangan gender dalam hal aksesibilitas, manfaat, kontrol, dan partisipasi pembangunan terutama di bidang politik dan ekonomi; 3) Masih tingginya tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; 4) Belum efektifnya kelembagaan, pelayanan, jaringan PUG dan PUHA; 5) Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak.

Perempuan memiliki hak, kesempatan, dan kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam seluruh proses pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 UUD 1945. Namun dalam praktiknya, perempuan masih menghadapi ketidaksetaraan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Kondisi ini berdampak pada masih terbatasnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat komunitas, organisasi masyarakat, maupun lembaga publik.

Budaya patriarki masih menjadi penghalang besar bagi kesetaraan gender di Indonesia, karena menempatkan laki-laki sebagai penguasa utama dalam keluarga maupun masyarakat. Dampaknya terasa dalam diskriminasi, keterbatasan peran perempuan, hingga kekerasan berbasis gender.

Menurut *Statistik Gender Provinsi Jawa Tengah 2024* yang dirilis BPS, Indeks Ketimpangan Gender Jawa Tengah turun menjadi 0,308, lebih baik dibanding tahun sebelumnya yaitu 0,336. Selain itu, Indeks Pembangunan Gender Jawa Tengah telah mencapai 93, menandakan kemajuan dalam pendidikan dan kesehatan perempuan. Namun, kita masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja dimana pada tahun 2024 tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan 61,82% laki-laki 85,66%. Meski membaik, tetap lebih rendah dibanding laki-laki.

Data kuantitatif tentang tren partisipasi perempuan dalam pengambilan

keputusan domestik di Indonesia menunjukkan adanya *peningkatan bertahap*, meski masih belum merata di semua aspek. SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia) menjadi sumber utama, dengan angka partisipasi perempuan dalam keputusan rumah tangga berada di kisaran 65–70% sejak 2012 hingga 2017. Tahun 2017, sekitar 68% perempuan menikah di Indonesia berpartisipasi dalam pengambilan keputusan rumah tangga, dan tren ini terus dikaitkan dengan faktor pendidikan, pekerjaan, serta norma budaya.

Meskipun peran perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keluarga sangat signifikan, keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan formal masih menghadapi berbagai hambatan, baik struktural maupun kultural. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya perspektif gender dalam kebijakan publik, sehingga keputusan yang dihasilkan sering kali belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu agenda strategis yang perlu mendapat perhatian serius.

Organisasi perempuan memiliki potensi besar sebagai representasi suara perempuan di berbagai sektor. Anggotanya tersebar hingga tingkat akar rumput dan menjadi penghubung penting antara kebutuhan perempuan dan proses kebijakan di daerah, serta memastikan suara perempuan masuk dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu, organisasi perempuan perlu mengambil peran dalam pengambilan keputusan dengan memperkuat kepemimpinan, memperkaya perspektif, dan mendorong kebijakan yang lebih inklusif. Dharma Wanita Persatuan (DWP) Jawa Tengah sebagai organisasi istri ASN memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan keluarga, meningkatkan kualitas pendidikan anak, serta memperkuat nilai-nilai sosial budaya. Oleh karena itu, diperlukan program penguatan peran serta DWP dalam pembangunan ketahanan keluarga yang terarah, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan salah satu Asta Cita Pembangunan, yaitu **Memperkuat pembangunan SDM** melalui sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, olahraga, kesetaraan gender, serta peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Agar isu prioritas tersebut dapat berjalan dengan baik, salah satu strateginya adalah dengan menguatkan sinergi dan jejaring antara pemerintah dan lembaga masyarakat, termasuk Dharma Wanita Persatuan (DWP). DWP merupakan organisasi yang beranggotakan isteri-isteri Aparatur Sipil Negara (ASN). Peran serta Dharma Wanita Persatuan (DWP) sangat strategis dalam mendukung percepatan

pelaksanaan program pemerintah, khususnya pada untuk kesejahteraan Perempuan, anak dan peningkatan kualitas keluarga.

Dharma Wanita yang ditetapkan pada tanggal 7 Desember 1999 pada sebuah rapat nasional bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya anggota keluarga PNS untuk mencapai kesejahteraan nasional. Sebagai organisasi yang diusung untuk tujuan bersama, Dharma Wanita memiliki tugas pokok yaitu "Membina anggota, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kepedulian sosial dan melakukan pembinaan mental dan spiritual anggota agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta berbudi pekerti luhur". Karena itulah peran DWP sangat penting karena berbasis keluarga.

Agar peran tersebut dapat berjalan optimal, dibutuhkan Penguatan Peran Serta Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui :

1. Workshop Pemberdayaan Ekonomi Perempuan bagi pengurus DWP Badan/ Dinas/ Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
2. Bazar Ramadhan, bertujuan untuk membuka kesempatan bagi UKM binaan DWP Badan/Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk untuk mempromosikan dan memasarkan produk mereka kepada masyarakat luas, memudahkan masyarakat untuk berbelanja kebutuhan selama bulan Ramadhan, terutama bagi mereka yang sibuk bekerja dan tidak sempat memasak untuk buka puasa maupun sahur, serta sarana untuk perputaran uang. Sasaran kegiatan ini adalah DWP Badan/Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, ASN Pemprov. Jateng dan masyarakat.
3. Talk Show "Kartini Masa Kini: Perempuan, Perubahan, dan Peran Publik", bertujuan untuk menggali makna Kartini masa kini, menafsirkan kembali nilai perjuangan R.A. Kartini dalam konteks modern, terutama terkait peran perempuan di ruang publik, menumbuhkan pemahaman bahwa perempuan memiliki kontribusi signifikan dalam perubahan pembangunan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. bagi pengurus dan anggota DWP di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
4. Capacity Building "Kepemimpinan Perempuan dalam Organisasi: Etika, Strategi, dan Kolaborasi", bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus DWP Provinsi Jawa Tengah dan DWP Badan/Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah serta Kabupaten/ kota dalam memahami isu-isu sosial yang berkembang, meningkatkan pemahaman tentang etika kepemimpinan dan tata kelola organisasi, keterampilan komunikasi dan pengambilan keputusan, serta meningkatkan kemampuan anggota dalam berjejaring dan mengelola organisasi dan sumber daya secara efektif. Sasaran Capacity Building ini adalah Pengurus DWP Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota.

5. Talkshow "Membangun Generasi Emas melalui Peran DWP di Hari Keluarga Nasional", bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anggota DWP dan masyarakat tentang pentingnya peran keluarga dalam mencetak generasi emas Indonesia, serta menguatkan peran DWP sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan ketahanan keluarga. Kegiatan ini mempunyai sasaran pengurus dan anggota DWP di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6. BIMTEK DWP Peran DWP Dalam Mendukung Program Unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, agar DWP mampu menyelaraskan kegiatan organisasi dengan arah pembangunan daerah, membangun sinergi antara DWP, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target Pembangunan, serta menyebarkan informasi tentang program pemerintah kepada keluarga ASN dan masyarakat luas.
7. SEMINAR HUT DWP "DWP Berdaya, Mengawal Asta Cita Menuju Indonesia Emas", bertujuan Meningkatkan pemahaman anggota DWP mengenai konsep *Asta Cita* sebagai arah pembangunan menuju Indonesia Emas,. Menguatkan kapasitas dan Mendorong partisipasi aktif anggota DWP dalam pembangunan berbasis keluarga, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan. Sasaran kegiatan pengurus DWP Badan/ Dinas/ Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah

b) Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, Data Dan Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi.
11. Program Kerja Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

c) Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Meningkatkan kapasitas anggota DWP dalam mendukung pemberdayaan dan perlindungan Perempuan, serta ketahanan keluarga.
2. Memperkuat dan mengembangkan sinergi dan kolaborasi kelembagaan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Tengah;
3. Meningkatkan komitmen lembaga masyarakat dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak serta keluarga
4. Memperkuat peran serta DWP Provinsi Jawa Tengah dalam perlindungan perempuan melalui pembangunan ketahanan keluarga

d) Output/Keluaran

Output atau keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini :

1. Sinergi dan kolaborasi antar lembaga masyarakat/ organisasi perempuan semakin kuat dan berkembang;
2. Adanya komitmen lembaga masyarakat dalam mempercepat terwujudnya rencana strategis nasional partisipasi untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

II. PELAKSANAAN

Penguatan Peran Serta Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan diselenggarakan pada :

Jadwal : Januari – Desember 2026 sesuai RKO yang ditentukan.
Tempat : Semarang, Surakarta, Purworejo (menyesuaikan kebutuhan)
Sasaran : DWP Badan/ Dinas/ Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah serta masyarakat.

III. ANGGARAN

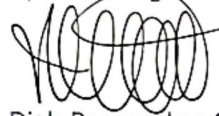
Anggaran Penguatan Peran Serta Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dialokasikan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

IV. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Semarang, Februari 2026

A.n. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang KGPP



Melati Diah Pamungkas SE, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19850516 2019012010

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI PEREMPUAN UNTUK
MENDUKUNG DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK (DRPPA)
MAGELANG, 21 MARET 2023

WAKTU	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
08.30-09.00	Registrasi	
09.00-09.30	Pembukaan Menyanyikan Lagu Wajib Indonesia Raya Laporan Panitia Sambutan Sekaligus Membuka Acara	DWP Provinsi Jawa Tengah Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
09.30-09.45	COFFE BREAK	
09.45-10.15	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam PP-PA	Narasumber : Kepala Dinas PP-PA Kabupaten Magelang
10.15-10.45	Peran Serta Organisasi Perempuan dalam mendukung DRPPA	Narasumber : Ketua DWP Provinsi Jawa Tengah
10.45 – 11.45	Diskusi	Moderator DWP Kabupaten Magelang
11.45 – 12.00	Kesimpulan	
12.00	Penutup	

Keterangan : Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah.